

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses penegakan hukum peradilan pidana di Indonesia sebagaimana yang diketahui, sudah diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHAP, hal demikian pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang didalamnya berbicara tentang proses peradilan dalam kasus tindak pidana di Indonesia. Proses penegakan hukum pidana yakni diawali dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang pada waktu tertentu tidak diterima dalam pergaulan hidup dimasyarakat dan harus dihilangkan/ ditiadakan oleh hukum pidana dengan hal-hal yang bisa bersifat memaksa didalamnya.¹

Berbicara dari sudut pandang sejarahnya, hukum pidana sebagai hukum publik sebagaimana dikenal sekarang telah melalui suatu perkembangan yang cukup panjang, dimana Perkembangan dari hukum pidana yang dipandang sebagai suatu tindakan merusak ataupun merugikan kepentingan orang lain kemudian disusuli suatu pembalasan yang tidak hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan atau

¹ Herna Prastyawati, 2016.: "*Analisa Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan*", Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

terkena tindakan melainkan meluas menjadi kewajiban seluruh keluarga, dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban masyarakat.²

Sampai saat ini proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih di dominasi oleh kehadiran pengadilan negara dengan seperangkat hukum beserta aparatnya, sehingga hamper bisa dipastikan bahwa penyelesaian dalam perkara pidana di luar pengadilan dianggap sebagai sebuah hal yang *tabu* dan tidak diperbolehkan. Hanya perkara perdata yang dapat diselesaikan diluar pengadilan baik melalui mediasi, rekonsiliasi maupun bentuk lain alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Padahal apabila perkara pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan maka dapat mengurangi penumpukan berkas yang terjadi di pengadilan. Dengan berkembangnya zaman banyak pengkajian terhadap masalah ini kemudian melahirkan model penyelesaian perkara pidana dengan prinsip kerjanya. Proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan ternyata juga mendatangkan perubahan dari sebelum-sebelumnya yang perkara selalu diselesaikan di pengadilan kini dapat diselesaikan diluar pengadilan, perubahan ini mendasar mengenai konflik antara korban serta pelaku tindak pidana.

Bentuk kejahatan atau tindak pidana yang seringkali terjadi di sekitar kita di lingkungan masyarakat sehari-hari adalah kejahatan dalam bentuk penganiayaan ringan seakan yang akhirnya mengindikasikan bahwa kejadian tersebut naytanya tidak lepas

²Lilik Mulyadi. 2013. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. Jurnal Ilmiah Yuristia. Vol.2 No.1. Hal. 1

dari perilaku masyarakat secara individu atau kelompok yang kurang terkontrol yang diawali dengan adanya perselisihan yang menjadikan factor terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut.

Kitab Undang Hukum Pidana sebenarnya telah mengkatagorikan beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang hal demikian tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula.

Tindak pidana terhadap tubuh atau yang disebut penganiayaan menurut Abdul Qodir al-Audah ialah merupakan setiap bentuk perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, namun tidak sampai menghilangkan nyawa orang yang dianiaya.³

Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 macam yakni Penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, berat berencana dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan. Adapun penyelesaian perkaranya maka jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 sampai dengan 356, yang salah satu cara penyelesaiannya ialah dengan *Alternatif Dispute Resolution* namun jika tindak pidana penganiayaan tersebut tergolong penganiayaan ringan sebagaimana yang termaktub pada pasal 352 KUHP

³Abdul Qadir Audah.2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. Tim Tsalisah, : Bogor PT.Kharisma Ilmu,, hal. 204

Terbitnya Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus dengan *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR), yang dalam hal ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482. surat ini secara efektif dapat berlaku jika sebuah perkara masih dalam tahap proses penyidikan ataupun penyelidikan. Berikut Beberapa point penekanan yang ada dalam surat tersebut :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana dengan kerugian materi kecil.
2. Penyelesaian kasus harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus.
3. Penyelesaiannya harus berasaskan musyawarah mufakat dan harus pula diketahui oleh masyarakat.
4. Penyelesaiannya harus menghormati norma hukum social maupun adat serta harus memenuhi azas keadilan;
5. Serta tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain, jika telah diselesaikan melalui ADR.

Konsep Surat ini sejatinya masih bersifat parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang secara tidak langsung dimaksud dalam surat Kapolri ini lebih menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana melalui ADR, harus dan mesti disepakati oleh pihak yang berperkara, tetapi apabila memang tidak terdapat kesepakatan baru, maka dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara professional juga proporsional. Berdasarkan hal demikian, maka Konsep ADR sendiri dalam pengimplementasiannya terhadap tindak pidana, dapat ditempuh dengan cara mediasi.

Mediasi dalam hukum pidana bisa diartikan sebagai sebuah proses penyelesaian perkara pidana melalui pertemuan antara pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama baik terkait dengan kejahatan yang dilakukan pelaku ataupun restitusi yang diberikan kepada korban. Pertemuan tersebut bisa diperantarai oleh seorang mediator dan lebih baiknya ialah penegak hukum, pemerintah, orang-orang yang bergerak dalam bidang lembaga swadaya masyarakat (LSM), ataupun tokoh masyarakat yang bersangkutan.⁴ Maka yang dimaksud mediator adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum., dimana mediasi yang selama ini biasanya dikenal ada dalam penyelesaian perkara hukum perdata. Adapun model mediasi yang banyak digunakan di negara-negara lain sebagai alternative penyelesaian perkara pidana (*penal mediation*) adalah *victim offender mediation* (VOM). Sedangkan di Indonesia model *victim offender mediation* ini nyatanya masih belum diberlakukan karena memang penyelesaian tindak pidana masih mengharuskan kehadiran dan peran pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut di dalamnya.

Pada pemeriksaan ditingkat penuntutan dan siding pengadilan, Andi Hamzah (Pakar Hukum Pidana) menjelaskan bahwa mediasi dapat saja dilakukan dengan pertimbangan salah satu dari hal berikut, yakni kepastian hukum (adanya aturan yang mendasarinya), kemanfaatan hukum (jelas manfaatnya) dan keadilan hukum (tidak memihak).⁵

⁴ Mark William Bakker. 1994. "Repairing The Breach and Reconciling the Discordant: Mediation in the Criminal Justice System", North Carolina Law Review No.72, hal. 1943

⁵ Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14.

Berdasarkan hal demikian, maka dalam penanganan kasus tindak pidana, secara sekilas mediasi penal mirip dengan yang biasa dikenal sebagai diskresi (*discretion*) yang ada dalam lembaga sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti halnya kepolisian dan kejaksaan, dimana dapat melakukan pemfilteran kasus-kasus yang masuk dan tidak meneruskannya melalui proses peradilan pidana. Namun jika diamati secara seksama maka terdapat esensi yang berbeda antara Mediasi Penal dengan sistem Diskresi yang disinggung diatas, dimana Mediasi Penal lebih mengedepankan kepentingan kedua belah pihak, baik pelaku ataupun korban, hingga akhirnya tercapai *win-win solution* yang dapat menguntungkan satu sama lain, dimana dalam proses mediasi penal korban dipertemukan langsung dengan pelaku dan bisa mengajukan tuntutan secara pribadi, sehingga dihasilkan perdamaian antara kedua belah pihak.

Contoh kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan mediasi penal yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi di daerah Wayliwok Kecamatan Wonosobo, kejadian yang bermula karena kesalah pahaman mengenai tuduhan kepada 13 orang remaja warga Pekon Sampang Turus dan Wayliwok kecamatan Wonosobo yang dicap sebagai pelaku begal dan berujung pada penghakiman oleh warga Dusun Tahala, Pekon Sumanda, Kecamatan Pugung, hingga empat dari 13 remaja mengalami luka serius dibagian kepala. Tersebut. Polre Tanggamus melaksanakan rembuk pekon penyelesaian konflik antara kampong di aula Aryaguna, Kamis (5/1/2017).

Kegiatan yang mencari jalan keluar perdamaian itu berlangsung pukul 10.00 wib, dengan dihadiri oleh 16 orang masyarakat Pekon Sumanda dan juga perwakilan dari keluarga korban. Kapolres Tanggamus AKBP Ahmad Mamora mengucapkan banyak

terimakasih atas kerjasamanya dalam menjalin sebuah kondisi yang aman dengan menggelar rembug pekon ini. Sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan cara adat dan kekeluargaan. Dan diminta kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di kabupaten Tanggamus dan Pringsewu, untuk tidak main hakim sendiri, serahkan kepada pihak kepolisian jika ada tindak pidana.⁶

Dilain hal, tidak sedikit juga kasus penganiayaan ringan yang berakhir dipengadilan, Sebagai contoh kasus fenomenal, penyanyi dangdut Dewi Muria Agung atau dikenal dengan nama Dewi Persik, dalam hal ini dituntut oleh jaksa dengan hukuman 6 bulan penjara, dimana setelah penyelidikan Ia dinilai terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap lawan mainnya di adegan sebuah Flim yakni Julia Perez,. Tuntutan itu akhirnya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tamalia Rossa, dan dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang digelar pada Rabu 15 Februari 2012, akhirnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan “terdakwa Muria Agung alias Dewi Perssik bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan pasal 351 ayat 1 KUHP”. namun kemudian, dalam sidang putusan yang digelar pada tanggal 14 Maret 2012, Majelis Hakim malah hanya menjatuhkan hukuman dua bulan penjara dengan masa percobaan empat bulan penjara.⁷

⁶Tribun Lampung, *Rembug Pekon Polres Tanggamus Damaikan 13 Remaja yang Dituduh Begal*, <http://lampung.tribunnews.com/2017/01/05/rembug-pekon-polres-tanggamus-damaikan-13-remaja-yang-dituduh-begal> diakses tanggal 4 Oktober 2018

⁷Kompas.com, Dewi Persik dituntut 6 bulan penjara, <https://amp.kompas.com/entertainment/read/2012/02/15/19080813/dewi.perssik.dituntut.6.bulan.penjara>, diakses tanggal 4 Oktober 2018

Kota Malang termasuk kota terpadat di provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari adanya tindak pidana penganiayaan ringan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakatnya, selain itu Kota Malang juga sebagai Kota pendidikan yang mana banyaknya Mahasiswa dari luar pulau Jawa yang merantau menuntut Ilmu di Daerah tersebut membuat banyaknya perbedaan suku ras dan agama. Berdasarkan data yang penulis temukan, dalam kurun waktu 2014 sampai dengan sekarang, Polres Malang Kota menangani kasus penganiayaan Berat pada tahun 2014 sebanyak 96 kasus dan tertangani 81 kasus pada tahun 2015 kasus penganiayaan berat menurun menjadi 40 kasus dan tertangani sebanyak 37 kasus, kasus penganiayaan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014 sebanyak 82 kasus dan tertangani sebanyak 46 kasus ditahun 2014 meningkat menjadi 86 kasus dan tertangani sebanyak 20 kasus dan kasus penganiayaan ringan pada tahun 2014 sebanyak 27 kasus tertangani 16 kasus ditahun 2015 penganiayaan ringan meningkat menjadi sebanyak 136 kasus tertangani sebanyak 87 kasus⁸, dari beberapa kasus penganiayaan ringan tersebut diselesaikan melalui mediasi penal, salah satu kasus tersebut adalah kasus yang terjadi baru-baru ini dimana telah terjadi kasus penganiayaan antara warga Dinoyo Malang dengan Mahasiswa Papua saat pemutaran film sejarah Papua barat yang berujung pada Mediasi, Proses mediasi digelar di Polres Malang Kota sejak pukul 2 siang, dihadiri Komandan Kodim 0833 Kota Malang Letkol (infanteri) Nurul Yakin, Plt Wali Kota

⁸Kota Malang Dalam Angka, 2017 (<https://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2017/06/Kota-Malang-Dalam-Angka-2016.pdf>), Akses 15 November, 2018.

Malang Sutiaji, ketua RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat dan pemilik rumah kontrakan.⁹

Penggunaan mediasi penal sebagai bentuk alternatif penyelesaian dalam peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana penganiayaan ringan sebenarnya tidak terbilang baru dan sejatinya bukan sebuah keharusan untuk dilaksanakan, akan tetapi seiring perkembangan zaman yang ada dan kebutuhan korban saat ini, mediasi penal yang merupakan salah satu terobosan hukum nyatanya memiliki manfaat yang banyak bagi kedua belah pihak yang terlibat dan memberikan keuntungan tersendiri bagi kedua belah pihak.

Terkait tentang uraian dan permasalahan di atas maka akhirnya penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait tentang Mediasi penal dalam penyelesaian perkara kasus penganiayaan ringan di Kota Malang dengan judul **MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES MALANG KOTA KOTA.**

B. Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlakukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban

⁹Radarmalang, *Polres Malang Kota Mediasi Bentrok Mahasiswa Papua Dan Warga Dinoyo*, <https://radarmalang.id/polres-malang-kota-mediiasi-bentrok-mahasiswa-papua-dan-warga-dinoyo/>, di akses tanggal 4 Oktober 2018

sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Malang Kota dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Polres Malang Kota dalam melakukan mediasi Penal sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Tujuan penulisan sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Malang Kota dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam proses mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

D.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian hukum berkenaan dengan mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana penganiayaan ringan di luar peradilan formal.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

D.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai penggunaan mediasi penal oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana penganiayaan ringan khususnya di Kota Malang.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

E.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus adanya kasus penganiayaan ringan yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum.

E.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu memahami dan terpacu untuk bersama-sama menegakkan hukum yang seadil-adilnya, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum atas kasus serupa di kemudian hari yang berhubungan dengan penggunaan jalur mediasi penal oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana penganiayaan.

E.3 Bagi Penegak Hukum

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam aspek penyelesaian perkara pidana khususnya dalam perkara pencabulan dan relevansinya dengan model penyelesaian menggunakan jalur mediasi penal.

E.4 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para mahasiswa mengenai obyek studi yang diangkat, sehingga para mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan dalam penegakan hukum di tengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

F.1 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan bersifat Yuridis Sosiologis (empiris). Yuridis artinya melihat apa hukumnya (*law in the book*) dan sosiologis artinya melihat bagaimana kenyataannya (*law in action*). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga sosial yang lain¹⁰.

Dari segi yuridis memandang hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang ada sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum yang tertuang dalam perundang-undangan ketika diterapkan dimasyarakat atau melihat realita yang terjadi di masyarakat.

¹⁰ Herry Kandati. *Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia*. <http://repo.unsrat.ac.id/>, diakses tanggal 29 Mei 2015.

F.2 Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang diangkat penulis, maka lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Polres Malang Kota. Alamat: Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang Jawa Timur 65112. Telepon: +62 341 364211. Website: resmalang.jatim.polri.go.id, Penulis memilih Polres Malang Kota sebagai lokasi Penelitian karena di Polres Malang kota menangani kasus penganiayaan ringan yang kasus tersebut diselesaikan melalui Mediasi penal.

F.3 Jenis Data

F.3.1 Data Primer

Data Primer “adalah jenis data dalam bentuk dokumen tertulis, file, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/pertama. Dalam penulisan hukum ini, data Primer yang digunakan oleh penulis lebih kepada data hasil wawancara berupa informasi dan dokumen-dokumen tertulis dari sumber-sumber utama terkait dengan penggunaan jalur mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Malang Kota. Dalam penulisan hukum ini penulis mewawancarai Kasat Reskrim dan penyidik Polres Malang Kota.

F.3.2 Data Sekunder

Data sekunder “adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan

lainlain).¹¹ Dalam penulisan hukum ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa dokumen-dokumen tertulis, informasi, dan pendapat-pendapat dari sumber-sumber lain (diluar sumber utama dalam data primer) yang berhubungan dengan mediasi penal penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan.

F.3.3 Data Tersier

Data tersier “adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary, dan jurnal.”¹²

F.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menunjang analisa penulis dalam penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara :

F.4.1 Wawancara

Sasaran wawancara (responden) dalam pengumpulan data ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian yaitu Sat Reskrim, penyidik Polres Malang Kotasebagai Fasilitator dalam mediasi dan para pelaku yang terlibat dalam kasus penganiayaan ringan.

F.4.2 Kepustakaan

¹¹ Pedoman Penulisan Hukum. 2016. Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 16.

¹²Ibid hal 17.

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmu hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis yaitu mediasi penal penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan.

F.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumen yang dimaksud di sini adalah studi dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan data yang ada di Polres Malang Kota, yang dalam penyajiannya akan dicantumkan di dalam penulisan hukum yang dibuat.

F. 5 Teknik Analisa Data.

Teknik analisa data dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Di dalam studi keilmuan hal yang demikian lazim digunakan dalam “*paradigmatic point of view*”. Seluruh penelitian kualitatif mempunyai kecenderungan untuk mendeskripsikan dan membuat jelas fenomena sosial yang penuh makna oleh cara pandang atau paradigma.¹³

Dalam penulisan Hukum ini penulisakan mendeskripsikan mengenai kasus penganiayaan ringan yang terjadi antara Mahasiswa Papua dengan

¹³ Sanapiah Faisal. 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang. Y. A3. hal. 2

Masyarakat Dinoyo Malang yang diselesaikan melalui Mediasi oleh Polres Malang Kota.

“Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati setelah mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁴ Dari hasil penelitian penulis akan memberikan data berupa data penganiayaan ringan yang diselesaikan oleh Polres Malang Kota terutamanya kasus Penganiayaan ringan yang diselesaikan dengan Mediasi Penal.

F.6 Rencana Penelitian

| NO | Nama Kegiatan | Waktu Kegiatan |
|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Pengajuan Outline | 20 Oktober 2018 |
| 2 | Pengajuan Proposal | 27 Oktober 2018 |
| 3 | Seminar Proposal | — |
| 4 | Revisi proposal | 7 November 2018 |
| 5 | Proses Izin penelitian | 9 November 2018 |
| 6 | Penelitian | 10 November - 1 Desember |
| 7 | Analisa Data | 2 Desember |
| 8 | Penulisan laporan | 5 Desember – 28 Desember |
| 9 | Ujian | Bulan Januari 2018 |

¹⁴Ibid hal 8.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Di dalam sub bab metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa bahan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi yaitu membahas mengenai tinjauan umum tentang delik aduan; yang terdiri dari tinjauan umum tentang mediasi penal, tinjauan umum tentang delik aduan (klacth delict), tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian pertama membahas mengenai proses penyelesaian mediasi penal dalam kasus penganiayaan ringan di Polres Malang Kota.. Bagian kedua membahas mengenai kendala yang dihadapi Polres Malang Kota dalam melakukan mediasi Penal sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap obyek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi mengenai masukan atas masalah yang diteliti oleh penulis yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.